

Kolom

Infrastruktur, Pemerataan, dan Ikon Kebanggaan

Pilar Wirotama - detikNews

<https://news.detik.com/kolom/d-4314039/infrastruktur-pemerataan-dan-ikon-kebanggaan>

Jumat 23 November 2018, 15:08 WIB



Presiden meninjau Jalan Trans Papua menggunakan motor (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta -

Pemerintah baru saja meresmikan Bandara APT Pranoto dan Maratua di Kalimantan. Kedua bandara ini menambah panjang daftar proyek infrastruktur yang berhasil diselesaikan pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, di balik sederet keberhasilan pemerintah tersebut muncul pro dan kontra seputar nilai atau manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur yang dibangun.

Terbaru, ada pihak yang beranggapan bahwa proyek infrastruktur pemerintah tidak memperhatikan risiko fiskal, risiko keuangan, serta tidak efektif dalam mengurangi pengangguran. Begitu banyak diskusi sengit yang membahas manfaat ekonomi pembangunan infrastruktur. Tapi, apa iya manfaat pembangunan infrastruktur hanya cukup dilihat dari kaca mata ekonomi saja?

Menyatukan Bangsa

Bertahun-tahun kita sering dengar ungkapan yang mengatakan bahwa pembangunan Indonesia hanya berpusat di Pulau Jawa, dan tampaknya hal itu memang benar adanya. Bandingkan saja infrastruktur yang ada di Jawa dengan pulau lain, dan kita bisa melihat bahwa pulau-pulau lain seakan menjadi "anak tiri" di rumah sendiri. Infrastruktur di

pulau lain kalah jauh baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan yang ada di Jawa.

Kini, melalui PSN pembangunan infrastruktur merambah ke wilayah-wilayah yang selama ini jarang disentuh. Di dalam PSN, ada 6 kelompok pulau yang memperoleh sebaran alokasi pembangunan infrastruktur, yaitu Sumatera (61 proyek, Rp 638 triliun), Kalimantan (24 Proyek, Rp 564 triliun), Jawa (93 proyek, Rp 1065 triliun), Bali dan Nusa Tenggara (15 proyek, Rp 11 triliun), Sulawesi (27 proyek, Rp 150 triliun), serta Papua dan Maluku (13 proyek, Rp 444 triliun).

Dari sebaran tersebut, terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia, dari barat hingga timur mendapat jatah pembangunan infrastruktur. Bahkan, Papua yang berada di ujung timur memperoleh alokasi yang cukup besar. Jalan Trans Papua adalah contoh hasil pembangunan infrastruktur melalui PSN. Dalam empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, jalan Trans Papua tembus 908,8 km selama 2015-2018. Terdiri dari 761,57 km di Papua dan 147,23 km di Papua Barat.

Presiden Jokowi turun langsung mengecek kondisi jalan Trans Papua. Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan di Papua bertujuan membuka isolasi daerah terpencil, mengurangi biaya tinggi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia mencontohkan, ruas Merauke-Boven Digoel sepanjang 424 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 8 jam. Sebelum diperbaiki, butuh berminggu-minggu untuk menempuh jalur tersebut.

Yang tidak kalah penting, dengan jalan Trans Papua ini masyarakat Papua akhirnya bisa merasakan fasilitas yang hampir setara dengan pulau lain. Jalan di tanah mereka kini beraspal sama dengan di Jawa dan pulau lainnya. Mereka pun merasa diperhatikan dan melihat bahwa negara hadir di tanah mereka untuk memastikan keadilan sosial benar ada bagi rakyatnya. Bukankah itu yang diinginkan oleh pendiri bangsa saat meletakkan Pancasila bagi fondasi negara kita?

Ekonom Emil Salim pun dalam satu kesempatan mengemukakan, "Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga *equality*, khususnya antara Indonesia Timur dan Barat. Pembangunan (infrastruktur) ini bukan hanya pembangunan ekonomi, tapi juga untuk menyatukan bangsa."

Kebanggaan

Saat meresmikan Bandara APT Pranoto dan Maratua, 26 Oktober lalu Presiden Jokowi menegaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah bukan

untuk gagah-gagahan. "Ini bukan untuk gagah-gagahan, juga bukan keren-kerenan. Tapi, mobilitas orang dan barang ke seluruh penjuru Tanah Air sangat penting," kata Presiden. Lebih lanjut ia menekankan bahwa Indonesia sangat luas dan hanya dengan konektivitas melalui pelabuhan, bandara, dan jalan rayalah Indonesia bisa disatukan.

Sesungguhnya, tidak ada yang salah dengan memiliki infrastruktur yang gagah dan keren, selama itu bukan tujuan yang utama. Sudah sedari dulu manusia berlomba-lomba menciptakan infrastruktur yang fungsional sekaligus ikonik, misalnya kereta cepat di Jepang, bandara terancang di Singapura, hingga Burj Khalifa di Dubai yang dikenal sebagai gedung tertinggi di dunia. Dan, tampaknya sudah menjadi hal yang umum pula jika maju tidaknya sebuah negara salah satunya dinilai dari seberapa kerennya infrastruktur yang ada di negara tersebut.

Selama bisa disandingkan antara nilai fungsi dan faktor gagah atau keren, mengapa tidak? Terlebih, di era media sosial yang identik dengan budaya "pamer", faktor keren dan gagah sebuah proyek infrastruktur bisa menjadi pendorong bagi orang untuk berlomba-lomba menceritakannya kepada orang lain dengan penuh rasa bangga.

Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) yang sedang dikebut pemerintah saat ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang memiliki *cool factor* selain fungsi utamanya untuk mengurai kemacetan Jakarta. MRT dapat mendongkrak citra Indonesia sekaligus membuat rakyat semakin bangga terhadap Indonesia.

Kalau dulu masyarakat harus pergi ke kota-kota di negara maju seperti London, New York, dan Singapura untuk merasakan moda transportasi sekelas MRT, nanti pada 2019 masyarakat Indonesia hanya perlu pergi ke Jakarta. Kehadiran MRT sangat dinanti oleh masyarakat, dan bisa bayangkan akan menjadi subjek "selfie" terpopuler di tahun 2019 nanti.

Selain MRT di Jakarta, renovasi yang dilakukan pemerintah di beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Mota Ain, Motamasin, Entikong, Nanga Badau, Aruk, dan Skouw perlu diapresiasi. Bangunan PLBN yang sebelumnya kurang terawat tersebut kini telah direnovasi menjadi bangunan yang lebih besar dan megah. PLBN kini menjadi "among tamu" yang gagah, rapi, dan ramah bagi negara Indonesia, tidak kalah dengan dengan pos perbatasan negara tetangga. Tahun depan, giliran PLBN Sota di Papua yang akan dipercantik. Hal ini tentu sangat membanggakan.

Dan, rakyat perlu terus merasakan kebanggaan atas Indonesia, terlebih menjelang pesta

demokrasi yang kemungkinan akan mengkotak-kotakkan elemen bangsa untuk sesaat. Rakyat perlu ingat bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang besar, dan rakyat perlu bangga bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia mampu terus membangun infrastruktur. Tak hanya di Pulau Jawa yang secara potensi ekonomi sangat besar, namun juga di wilayah-wilayah lainnya. Karena sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi di acara ulang tahun ke-50 Kadin Indonesia, kita ini bernegara, bukan sedang berbisnis.

Pilar Wirotama pemerhati sosial dan pecinta dunia komunikasi, pegawai Kementerian Keuangan; tulisan ini tidak mencerminkan kebijakan organisasi tempat penulis bekerja

(mmu/mmu)